

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Setelah periode pemerintahan orde lama dan orde baru, Indonesia saat ini memasuki masa reformasi. Sejak tahun 1998, Indonesia telah merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi yang telah bertransformasi menjadi proses desentralisasi. Era reformasi membawa keadaan politik di Indonesia menuju perubahan setelah lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan orde baru, Indonesia memulai pembenahan politik barunya di bidang demokrasi. Dengan momentum Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada pertengahan 1998, menandai datangnya periode ini.

Sejak reformasi terjadi pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan pemilu yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam memilih. Rakyat berhak memilih siapapun pilihan politiknya secara langsung tanpa diwakilkan oleh wakil rakyat lagi, Hal ini diatur didalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, tentang persamaan derajat seluruh warga negara terhadap hukum dan pemerintah; Pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul, dan mengemukakan pendapat; Pasal 31, paragraf 1 Tentang hak setiap warga negara atas pendidikan. Hal ini dapat langsung menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya setiap warga negara dapat dengan bebas mengutarakan pendapatnya dan juga dapat dengan leluasa menentukan organisasi atau pilihan politik mana yang akan dipilih masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Pemilu yang dikontestasikan ada tiga jenis yaitu Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilukada. Fokus utama dalam tulisan ini adalah mengenai Pemilu Legislatif atau Pileg. Pemilu Legislatif merupakan pemilihan umum yang dilakukan kontestasinya selama 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif di Republik Indonesia.

Pemilu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 pada era Presiden Soekarno. Pada kala itu, pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR dan anggota

Konstituante. Lalu, pada era Presiden Soeharto yakni tahun 1971-1997, Selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia, telah dilaksanakan sebanyak enam kali penyelenggaraan Pemilu yang diperuntukkan memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada masa pemerintahan Soeharto ini, Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat.

Lalu masuk masa setelah reformasi, dimana sistem demokrasi mulai terbentuk dengan sistem yang rakyat dapat memilih langsung pemimpinnya dimulai dari tahun 2004, hal ini kemudian dapat ditandai sebagai momentum pemilihan langsung oleh rakyat untuk tingkat Pilpres. Pada Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004, masyarakat secara langsung dapat memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 pun diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD serta DPRD periode 2004-2009.

Kota Depok juga termasuk salah satu kota dari sekian banyak sekian banyak kota di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan untuk memilih kepala daerahnya. Depok merupakan daerah yang dalam kontestasi politik cukup menarik perhatian, daerah kota ini yang letaknya di dekat ibu kota negara dan juga sebagai salah satu penyangga dari ibu kota dalam hal kontestasi politik tentu dinamikanya menarik perhatian. Hal ini menjadi menarik, dikarenakan, dalam pemerintahannya hanya ada satu partai saja yang menguasai atau mendominasi pemilihan walikota di kota tersebut. Mulai pada tahun 2005 kursi Wali Kota di kota Depok dipegang oleh partai PKS. Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat sebagai PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai pada saat berdiri ialah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il, yang saat itu presiden partai sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai, dan menerima tawaran tersebut dan penggantinya ialah Hidayat Nur Wahid yang dipilih dan diangkat tanggal 21 Mei 2000.

Efek dari terbitnya UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 mengenai berlakunya syarat untuk memiliki batas suara minimum agar dapat ikut serta pada pemilu

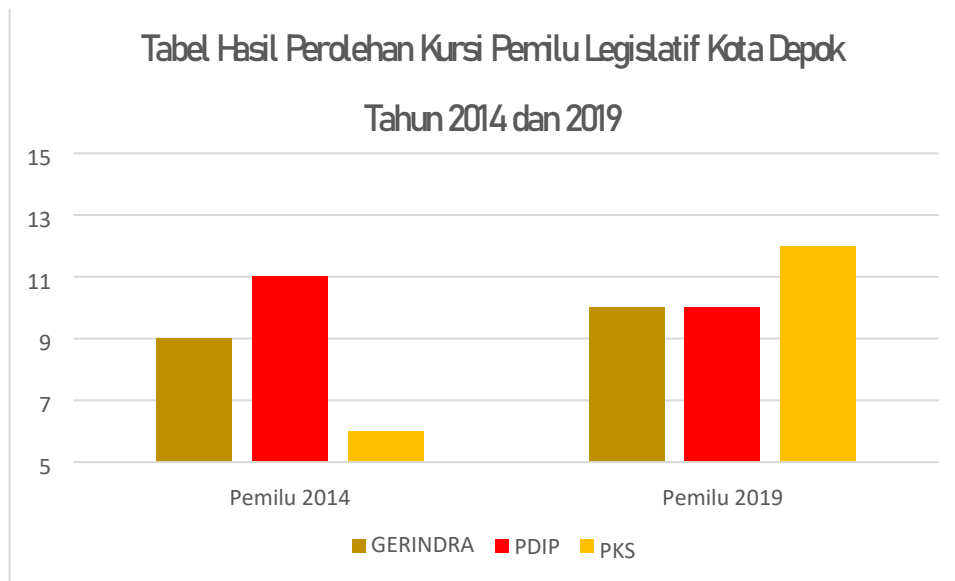
selanjutnya (*electoral threshold*) sebesar dua persen, akibatnya Partai Keadilan diharuskan agar merubah nama partai sehingga dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada tanggal 2 Juli tahun 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan merampungkan seluruh proses verifikasi yang dilakukan di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) oleh tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Di hari besoknya kemudian tepatnya tanggal 3 Juli tahun 2003, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). (<https://pks.id/content/sejarah-ringkas> diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 9:01)

Dominasi satu partai di tingkat eksekutif cukup menjadi perhatian menarik dari kota ini, karena partai ini memiliki basis dari pendukung atau sayap yang cukup besar di kota ini, namun bahwasannya hal itu berbanding terbalik dengan hasil-hasil yang di peroleh tingkat legislatif atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) partai PKS cenderung memperoleh suara yang naik turun.

Dalam kurun waktu dari 2004-2009 PKS mampu menjadi partai pemenang di DPRD Kota Depok dengan perolehan kursi 12. Di pemilihan berikutnya yaitu pada tahun 2009-2014, jumlah kursi ini turun menjadi 11 dan kalah dari partai Demokrat yang memenangkan pemilihan pada tahun tersebut. Lalu jumlah ini menjadi turun drastic pada pemilihan 2014-2019 dimana jumlah kursi yang didapatkan hanya berjumlah 6 kursi. Pada pemilihan anggota dewan untuk tingkat kota terbaru pada pileg 2019 untuk memilih anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partai Keadilan Sejahtera memenangkannya.

Dengan jumlah perolehan suara PKS yakni 180.219 suara, partai ini mampu memenangkan kursi DPRD paling banyak dari partai lain sebanyak 12 kursi. Sedangkan PDI-P, partai yang sebelumnya memenangkan kursi paling banyak di 2014-2019 hanya memperoleh 165.479 suara, dengan total kursi 11. Dari hasil ini menandakan bahwa PKS telah memenangkan pemilu legislatif tingkat DPRD di Depok.

**Tabel 1.1** Perbedaan Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Depok tahun 2014 dan 2019



sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>

Tentu banyak faktor yang membuat partai ini dapat memenangkan lagi pemilihan tingkat DPRD kali ini. Salah satu nya adalah dari segi kampanye yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan suara yang cukup besar lonjakannya dari pemilihan sebelumnya. Setiap parpol memiliki strategi tersendiri untuk menarik simpati masyarakat dengan harapan parpol tersebut dapat memenangkan pemilu, pemasaran parpol sering dilakukan baik melalui promosi berupa iklan yang dipajang di sudut-sudut keramaian kota maupun iklan yang menarik perhatian di TV ataupun media sosial. Dengan kampanye yang dilakukan oleh partai ini, tentu untuk memikat hati masyarakat memilih partai atau caleg dari partai ini akan berbeda dengan kontestasi untuk memilih walikota. Strategi-strategi yang dilakukan juga tentu berbeda pula.

Dengan lonjakan jumlah suara yang cukup besar sehingga dapat memenangkan kursi sebanyak 12 (dua belas) tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai strategi kampanye yang dilakukan oleh para kader atau mesin politik dari Partai Keadilan Sejahtera.

## 1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana strategi kampanye politik dari Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan suara pemilihan legislatif tahun 2019 tingkat DPRD di kota Depok?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Strategi kampanye politik yang dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi yang berjumlah 12 masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019 setelah tahun 2014 mengalami kekalahan dan hanya mendapat 6 kursi saja
2. Faktor pendukung PKS dalam meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok.
3. Faktor yang menjadi penghambat PKS dalam meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, bagi:

- 1.4.1 Mahasiswa/i:** sebagai referensi dan bahan komparasi pembelajaran dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang substansi hasil penelitian. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu kajian Ilmu Politik untuk pengembangan teori mengenai strategi kampanye politik. Dalam hal ini untuk mempelajari strategi kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok
- 1.4.2 Masyarakat:** memberikan manfaat dalam pengetahuan mengenai kepartaian dalam hal ini strategi partai serta sebagai gambaran dan evaluasi terhadap strategi pemasaran dan kampanye politik

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian bab pertama ini, mempunyai isi mengenai signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang memiliki topik masalah yang serupa dengan topik yang diambil oleh peneliti, serta berisi tentang konsep-konsep dasar yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dan kerangka berpikir penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan temuan di lapangan sesuai dengan latar belakang permasalahan, yaitu peran aktor dan relasi kuasa dalam formulasi kebijakan JSC dan mencoba menjawab serta menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan dan penyelesaian penelitian, sedangkan saran merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada berkaitan dengan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun proposal penelitian.